

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur, Kabupaten Blitar secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 1906. Blitar yang dikenal dengan kota lahar dan kota Bumi Bungkarno karena adanya makam proklamator “bungkarno” di Blitar, Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588,79 km² dengan kepadatan penduduknya 710/km². Kabupaten Blitar memiliki 22 kecamatan yang dibagi menjadi 220 desa dan 28 kelurahan, batas wilayah Kabupaten Blitar ialah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung di sisi barat, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang di sisi utara, dan Kabupaten Malang di sisi timur, dan Samudra Hindia di sisi selatan Kabupaten Blitar.

Kabupaten Blitar memiliki penduduk yang lebih dominan bekerja dalam sektor pertanian, hal ini tidak dapat dipisahkan karena sangat dekat jaraknya dengan Gunung Kelud, hal ini karena dengan keberadaan Gunung Kelud yang masih menjadi salah satu gunung berapi yang masih aktif di Jawa Timur, sehingga dapat dipastikan daerah di Kabupaten Blitar masih memiliki tanah yang sangat subur, namun Kabupaten Blitar juga memiliki daerah pantai yang luas sehingga masyarakat di pesisir pantai berprofesi sebagai nelayan. Selain itu masyarakat Kabupaten Blitar juga ada yang berprofesi sebagai penambang pasir rakyat di 47 beberapa tempat di daerah aliran sungai dari gunung kelud maupun di pinggiran DAS Brantas yang memang terkenal memiliki kualitas pasir yang bagus untuk dijadikan material bangunan.

Kabupaten Blitar juga terkenal sebagai industri ikan koi, sering diadakan lomba tingkat nasional di Kabupaten atau Kota Blitar, selain itu Kabupaten Blitar juga terkenal dengan wisata buah blimbing dan coklat. Kampoeng coklat juga menjadi salah satu pariwisata edukasi baru di Kabupaten Blitar, dimana ada pelatihan dan tata cara pembuatan coklat dari proses awal menanam pohon kakao hingga pengolahannya hingga menjadi coklat yang siap dipasarkan. Kabupaten Blitar juga terus berkembang dalam sektor pertanian maupun pariwisata rakyatnya.

1. Profil Wilayah

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111° 25'–112° 20' BT dan 7° 57'–8° 9' 51' LS berada di Barat daya Ibu Kota Provinsi Jawa Timur–Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. Adapun batas–batas wilayah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang

Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 KM dengan tata guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain, Kabupaten Blitar juga di belah aliran sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan yang sekaligus

membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana Blitar Utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah dan Blitar Selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering.

Wilayah Blitar selatan terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik Potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil – hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi “point of essential” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar.

2. Profil Administrasi

Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Blitar terbagi menjadi 22 kecamatan, 220 desa, 28 kelurahan, 759 dusun/Rukun Warga (RW) dan sebanyak 6.978 Rukun Tetangga (RT). Untuk menggerakan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar terdapat 13.209 jumlah pegawai negeri sipil yang didukung oleh 144 tenaga honorer (non PNS) yang tersebar di 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun kelembagaan/organisasi Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.3 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor di Lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar, adalah sebagai berikut: SKPD Badan meliputi: 8 SKPD, Dinas

terdiri dari: 15 SKPD, Sekretariat DPRD= 1 SKPD Kantor terdiri dari: 6 SKPD, Bagian terdiri dari 9 SKPD dan SKPD kecamatan terdiri dari 22 kecamatan serta 28 SKPD kelurahan. Pada akhir tahun 2008 yaitu tanggal 30 Desember 2008 Pemerintah Kabupaten Blitar menerbitkan Peraturan Daerah No.18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, No.19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar, No.20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Dinas, No.21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, No.22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP. Pemerintah Daerah tersebut sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 dimana struktur kelembagaan pemerintah Kabupaten Blitar terdiri dari: Badan= 7 SKPD, Dinas= 16 SKPD, Kantor= 4 SKPD, Bagian= 9 SKPD, Inspektorat = 1 SKPD, Sekretariat DPRD= 1 SKPD.

Adapun jumlah anggota DPRD Kabupaten Blitar hasil pemilihan umum legislatif tahun 2005 terdiri dari 45 orang dengan rincian: PDI Perjuangan= 16 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)= 12 orang, Partai Golkar= 8 orang, Partai Demokrat= 5 orang, Partai Persatuan Pembangunan= 1 orang, Partai Amanat Nasional (PAN)= 2 orang dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)= 1 orang.

B. Gambaran Umum Desa Tumpang Kabupaten Blitar

1. Sejarah Desa

Asal-usul desakonon menurut cerita yang telah banyak beredar di masyarakat warga Desa Tumpang yang dikuatkan dengan keterangan dari sesepuh desa bahwa Desa Tumpang berdiri sejak tahun 1880M berkat perjuangan para

pendiri yang terdiri dari: 1) eyang Ky. Diposari, 2) Mbah Kriyo Sentono dan para pengikut serta sanak saudaranya.

Desa Tumpang merupakan bagian wilayah dari Desa Jeblog yang konon pada tahun 1880M terjadi pemecahan wilayah desa menjadi 3 desa yang terdiri dari Desa Jeblog, Desa Tumpang, dan Desa Kendalrejo. Dan bapak Kasan Dikromo akhirnya dikukuhkan sebagai kepala desa pertama di Desa Tumpang pada tahun 1880M yang melaksanakan tugas sampai tahun 1899M dan Desa Tumpang ini merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Talun.

Sejarah Pemerintahan Desa sebagai Desa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa Tumpang sebagaimana desa-desa yang lain disekitarnya adalah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Talun. Adapun secara ringkas kondisi Pemerintah Desa dapat di rinci:

a. Sebelum UU.No.5 Tahun 1979 Tentang Desa

Pada Saat itu Pemerintahan Desa Memakai tradisi kuno dengan sebutan terhadap petugas desa sebagai Lurah, Carik, Kamituwo, Kebayan, Jogotirto, Jogoboyo dan Modin.

b. Adanya UU.No 5 Tahun 1979

Banyak perubahan terjadi pada struktur Pemerintah Desa yang secara Nasional desa-desa di Indonesia diseragamkan, sebutan pamong desa dikenal dengan perangkat desa yang antara lain perubahan nama-nama jabatan Kepala Desa (Masa jabatan 8 tahun), Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sampai sekarang ini. Sedangkan lembaga legislatif adalah lembaga Musyawarah Desa (LMD).

- c. Desa berdasarkan UU.Nomor 5 Tahun 1999

Hal yang menonjol pada masa ini, adalah Jabatan kepala desa menjadi 2 Kali 5 tahun atau 10 (sepuluh) tahun.Sedangkan Legislatif pada Era ini adalah Badan Perwakilan Desa (BPD).

- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Masa jabatan Kepala desa menjadai 6 tahun,dan Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten /Kota.Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Masa jabatan

Kepala desa menjadai 6 tahun, dan Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten /Kota.Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

2. Kepemimpinan Desa

Di Desa Tumpang telah terjadi beberapa pergantian Kepala Desa. Secara rinci kepala desa yang pernah bertugas di Desa Tumpang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1**Kepimpinan Kepala Desa yang bertugas di Desa Tumpang**

No	Nama	Nama Jabatan	Masa Tugas
1	KASAN DIKROMO	Lurah	1880 s/d 1899
2	SODIKROMO SOGLANG	Lurah	1899 s/d 1905
3	SODIMEDJO GONDOK	Lurah	1905 s/d 1925
4	KASIR DARDJO	Lurah	1925 s/d 1927
5	RABUN	Lurah	1927 s/d 1946
6	H.NURRUDDIN	Kepala Desa	1946 s/d 1968
7	IMAM MUHAJIR	Kepala Desa	1968 s/d 1971
8	ABDUL WAHAB	Kepala Desa	1971 s/d 1990
9	NURROSIN	Kepala Desa	1990 s/d 2007
10	TRI HANDAYANI,SE	Kepala Desa	2007 s/d 2013
11	H.MUHTAROM	Kepala Desa	2013 s/d 2016
12	SUBANDI	Kepala Desa	2017 s/d 2018
13			
14	AGUS SALIM	Kepala Desa	2018 s/d Sekarang

Sumber: Penelitian Desa Tumpang 2018

3. Pembangunan Desa

Kebijakan pembagunan desa yang menyolok pada saat pemerintahan orde baru adalah sangat ditentukan oleh swadaya kemandirian masyarakat warga desa yang di dukung adanya dana subsidi Pemerintah Pusat yang setiap tahun diberikan. Berbeda dengan sekarang dengan adanya UU Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, desa mendapatkan kucuran Dana ADD bagian dari DAU Pemerintah Kabupaten dari Pemerintah Pusat.

Pembangunan sebuah desa yang merupakan tumpuhan dan harapan masyarakat untuk mewujudkan kebersamaan, menyalurkan aspirasinya dan menaruh harapan besar bagi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat penghuninya merupakan dambaan dan harapan masyarakat desa ini.

Dari awal berdirinya desa sampai saat ini telah dibangun sarana dan prasarana yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, baik pembangunan bidang fisik prasarana, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya secara bertahap. Pembangunan desa yang telah dilakukan oleh pendiri dan penerus tokoh desa telah berupaya sekuat kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk senantiasa membangun desa demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat penghuninya.

4. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Tumpang merupakan kawasan yang potensial terbukti keberadaan kawasan areal persawahan yang subur, dengan curah hujan yang cukup tinggi. Topografi desa ini adalah berupa dataran rendah dengan ketinggian yaitu sekitar 124 m di atas permukaan air laut. Adapun batas desa tersebut meliputi:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Sawentar Kec. Kanigoro
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Jeblog Kec. Talun
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Jegu Kec. Sutojayan
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Kendalrejo Kec. Talun

Gambar 3.1

Peta Kantor Desa Tumpang Kabupaten Blitar



Sumber: Penelitian Desa Tumpang 2018

5. Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran

a. Visi

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh Pemerintah Desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat,

menilai atau memberi predikat terhadap kondisi Desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Tumpang adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Desa Tumpang yang Bersatu, Tenteram, Membangun dan Sejahtera.”

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Tumpang. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Tumpang yang mandiri dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya, melalui pembangunan dan pengembangan pendidikan serta pertanian yang berwawasan teknologi, terciptanya peluang usaha baru dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, terciptanya lapangan kerja untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatnya usaha sektor riil masyarakat sehingga bisa mengantarkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Untuk mewujudkannya perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, kelembagaan desa yang kuat serta sumber daya manusia masyarakat desa yang terampil dan mampu menguasai teknologi. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, industri rumah tangga dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

b. Misi

Hakekat Misi Desa Tumpang merupakan turunan dari Visi Desa Tumpang. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Tumpang merupakan penjabaran lebih operasional dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan

situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Tumpang.

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus prioritas program yang akan dilaksanakan. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa untuk mewujudkan Visi Desa. Untuk meraih Visi Desa tumpang seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Tumpang.

6. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tumpang tahun 2014-2019, sebagai berikut:

- 1) Membentuk aparatur pemerintahan desa yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam melayani masyarakat sehingga terwujud pemerintahan yang efisien dan efektif.
- 2) Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan mempunyai tempat tinggal (papan).
- 3) Menyediakan infrastruktur pedesaan yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, pertanian, sosial dan budaya.
- 4) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, yang berdaya saing, pengembangan ekonomi perdesaan non-pertanian, penerapan teknologi tepat guna dan menciptakan lapangan kerja.

- 5) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.
- 6) Membentuk masyarakat yang berkepribadian dengan mematuhi aturan hukum dan menerapkan nilai-nilai budaya luhur, dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan.

b. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan perencanaan pembangunan jangka menengah Desa Tumpang tahun 2014-2019, adalah sebagai berikut:

- 1) Terbentuk aparatur pemerintah desa yang mempunyai kapasitas dan kemampuan dalam melayani masyarakat sehingga terwujud pemerintahan desa yang efisien dan efektif.
- 2) Terbangun pelayanan dasar yang memadai dan berkualitas; meliputi pendidikan, kesehatan, tempat tinggal memadai (papan) dan lingkungan hidup.
- 3) Terbangun Infrastruktur perdesaan yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, sosial dan budaya.
- 4) Terciptanya kegiatan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, berdaya saing dan ekonomi perdesaan serta penerapan Iptek.
- 5) Terbangunnya ekonomi masyarakat melalui usaha pertanian, peternakan dan jasa.

- 6) Terwujudnya kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa, melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

7. Kondisi Fisik Desa

Desa tumpang merupakan wilayah yang terdiri dari pemukiman penduduk, lahan kering, lahan persawahan dengan luas wilayah desa 4,03 Km² atau 403Ha. Dimana seluas 183Ha adalah pemukiman penduduk dan sisanya adalah lahan kering dan areal persawahan. Wilayah Desa Tumpang dilewati sungai putih sepanjang 3km. Iklim Desa Tumpang berdasarkan data BPS Kabupaten Blitar tahun 2013 adalah tropis, selama tahun 2013 curah hujan di Desa Tumpang rata-rata mencapai 194mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 590mm yang merupakan curah hujan tertinggi.

a. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2017, jumlah penduduk Desa Tumpang adalah terdiri dari 1729KK, dengan jumlah total 5159jiwa, dengan rincian 2572 laki-laki dan 2587 perempuan sebagaimana tertera pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	233 Orang	239 Orang	472 Orang	9,1%
2	5-9	214 Orang	218 Orang	432 Orang	8,3%
3	10-14	248 Orang	213 Orang	461 Orang	9%
4	15-19	179 Orang	197 Orang	376 Orang	7,4%
5	20-24	178 Orang	162 Orang	340 Orang	7%
6	25-29	210 Orang	225 Orang	435 Orang	8,4%
7	30-34	198 Orang	197 Orang	395 Orang	7,6%
8	35-39	192 Orang	219 Orang	411 Orang	8 %
9	40-44	204 Orang	212 Orang	416 Orang	8%
10	45-49	168 Orang	167 Orang	335 Orang	6,4%
11	50-54	164 Orang	143 Orang	307 Orang	6%
12	55-58	109 Orang	118 Orang	227 Orang	4,4%
13	>59	275 Orang	277 Orang	552 Orang	11%
Jumlah Total		2572 Orang	2587 Orang	5159 Orang	100,00%

Sumber: Data BPS Kabupaten Blitar dalam angka 2017

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Tumpang sekitar 2332 atau hampir 45,4%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Tingkat kemiskinan di Desa Tumpang termasuk sedang. Dari jumlah 1729KK di atas, sejumlah 187KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 345KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 575KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 521KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 10KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I

digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka 16,07% KK Desa Tumpang adalah keluarga miskin.

b. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Tumpang untuk penduduk miskin Rp 10.000/hari, untuk ekonomi sedang Rp 25.000/hari dan untuk ekonomi menengah ke atas Rp 300.000. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Tumpang dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa atau perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 111 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 150 orang, yang bekerja di sektor industri 118 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 218 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1466 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 3.3
Mata Pencaharian Masyarakat

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	415 orang	28,31%
2	Jasa/ Perdagangan 1. Jasa Pemerintahan 2. Jasa Perdagangan 3. Jasa Angkutan 4. Jasa Ketrampilan 5. Jasa lainnya	56 orang 179 orang 34 orang 81 orang 69 orang	3,82 % 12,21 % 2,32 % 5,53 % 4,71 %
3	Sektor Industri	118 orang	8,05 %
4	Sektor lain	514 orang	35,06 %
Jumlah		1466 orang	100 %

Sumber: Data BPS Kabupaten Blitar dalam angka 2017

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Tumpang masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 592 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 3169 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Tumpang.

8. Pembagian Wilayah Desa

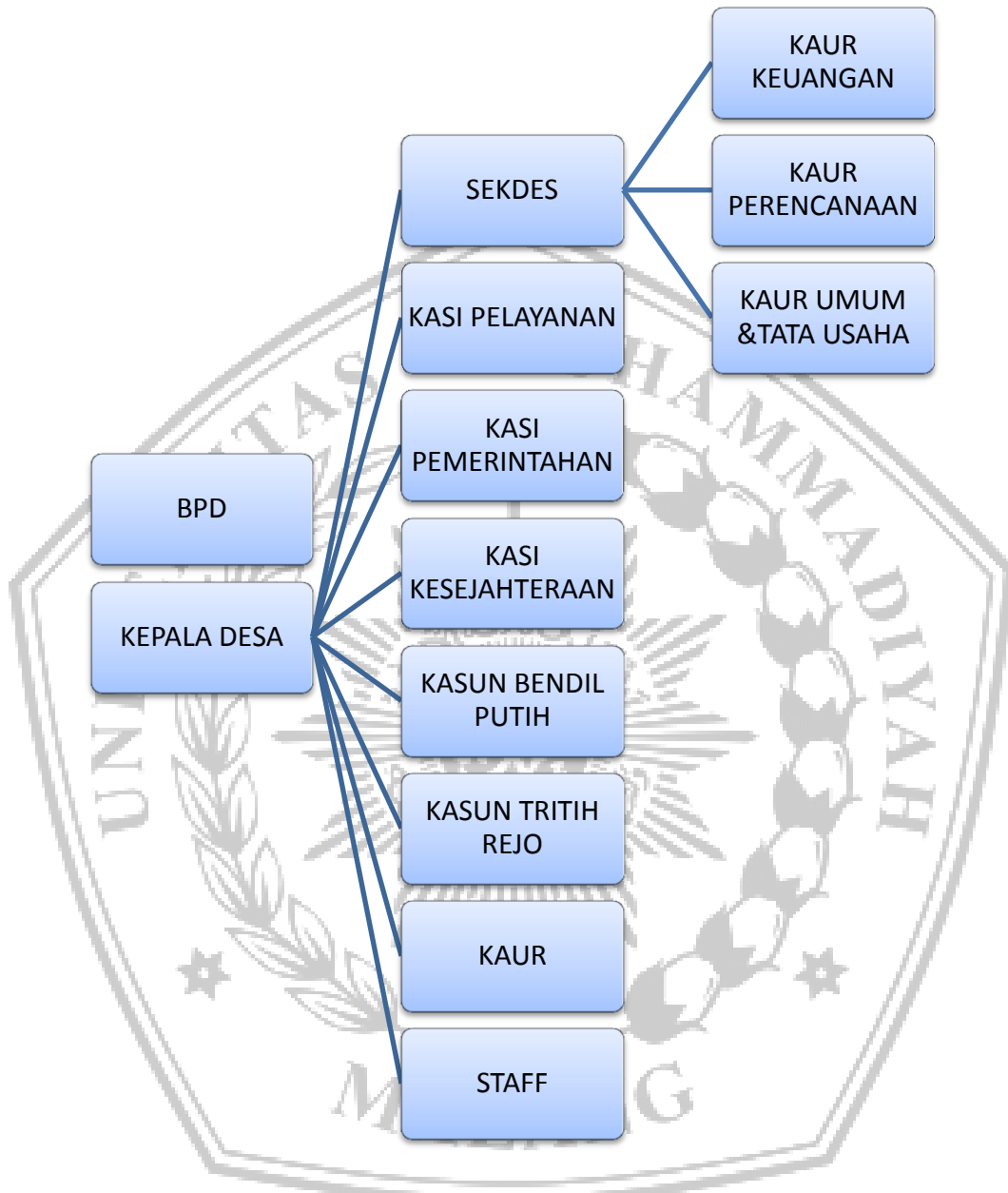
Wilayah Desa Tumpang terdiri dari 2 Dusun yaitu: Dusun Bendil Putih dan Dusun Tritihrejo, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Tumpang dari kedua dusun tersebut terbagi menjadi 8 Rukun Warga (RW) dan 31 Rukun Tetangga (RT).

9. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Tumpang memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk. Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Tumpang tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Gambar 3.2

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tumpang



C. Proses Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumpang

Pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perlu diketahui bahwa dana desa merupakan bantuan dari pemerintah sebagai wujud dari pelimpahan wewenang untuk penyelenggaraan otonomi desa

secara mandiri. Sehingga dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut terbentuklah organisasi pengelolaan keuangan desa di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar sebagaimana yang diatur di dalam pasal 3 sampai dengan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari:

1. Kepala Desa sebagai Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
2. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)/perangkat desa yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa menjabat sebagai Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
 - b. Kepala Seksi (bidang keuangan) menjabat sebagai pelaksana kegiatan.
 - c. Staf Urusan Keuangan menjabat sebagai bendahara.

Kepala Desa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah karena Kepala Desa jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan seperti:

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
2. menetapkan PTPKD.
3. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
4. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Selanjutnya Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD)adalah unsur dari perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD berasal dari unsur perangkat desa,terdiri yang terdiri dari:

1. Sekretaris Desa, selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
2. Kepala Seksi.
3. Bendahara, PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Kemudian Sekretaris Desa, sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Dan Kepala Seksi disini bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

2. melaksanakan kegiatan dan atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Kemudian yang terakhir adalah Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Selain itu bendahara juga mempunyai tugas sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait proses pengelolaan yang mencakup pencairan Dana Desa di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar mempunyai alur yang telah ditetapkan, yang mana secara singkatnya PTPKD yang menangani bidang pembangunan fisik maupun non fisik mengajukan (SPP) Surat Perintah Pencairan yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa kepada

Bendahara Desa. kemudian Bendahara Desa melakukan pencairan sesuai dengan yang diajukan oleh PTPKD, setelah itu, selanjutnya uang yang telah dicairkan tersebut diserahkan kepada petugas yang menangani bidang tersebut. Setelah uang tersebut diterima oleh PTPKD masing-masing bidang kemudian uang tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ada. Dalam melakukan kegiatannya pemerintah desa berpedoman kepada peraturan-peraturan pemerintah yang sudah ada.

